

IDENTIFIKASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PESISIR

THE IDENTIFICATION AND EMPOWERMENT OF POOR COASTAL COMMUNITIES

Muslim Sabarisman

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III Jakarta Timur

E-mail: sleemndr@gmail.com

Abstrak

Melihat luas wilayah lautan di Indonesia yang sangat besar, tak dapat dipungkiri di tengah potensi besar lautan justru kemiskinan banyak terdapat di wilayah pesisir, khususnya masih banyak kemiskinan melanda kehidupan nelayan. kemiskinan nelayan merupakan yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh dan terintegrasi. Berkaitan dengan itu, Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengidentifikasi peran kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Berdasarkan hasil kajian literatur, masyarakat pesisir memerlukan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan melalui pemberdayaan bagi masyarakat pesisir melalui pendekatan pemberdayaan sesuai dengan karakteristik kehidupan sosial nelayan yang unik, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat pesisir. Pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan, dan potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat pesisir. Melalui hasil literatur ini, akan diperoleh informasi peran kemiskinan dan solusi pemberdayaan bagi masyarakat pesisir. Sumber informasi artikel ini dikumpulkan dari berbagai sumber rujukan seperti buku, jurnal, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi yang sesuai dengan topik yang diangkat. Kemudian data sekunder yang diperoleh disajikan dalam bentuk pemaparan secara deskriptif dengan cara mengikhtisarkan beberapa rujukan yang berkaitan dengan topik. Artikel ini diharapkan sebagai bahan solusi pengembangan kebijakan dan program sosial penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kata Kunci : *identifikasi, peran kemiskinan, pemberdayaan, kebijakan dan program sosial.*

Abstract

Looking at the vast ocean territory in Indonesia, we cannot deny that in the huge potentials of the ocean , poverty precisely afflicts the coastal areas, in particular: among fishermen. Poverty among fishermen is multidimensional so that it needs comprehensive and integrated solution. Related to the problem above, this article was written with the purpose to identify the role of poverty and the empowerment of coastal communities. Based on the results of literature study, coastal communities require a systematic and organized effort to influence and to enforce the occurrence of changes. The changes can be made through the empowerment of coastal communities through the empowerment approach in accordance with the unique characteristics of fishermen's social life, by observing the principles of empowerment of coastal communities. This approach is implemented by seriously considering the aspirations, desires, needs, income, and the potential resources owned by coastal communities. Through this literature, we will retrieve information, problems of poverty and empowerment solutions for coastal communities. The information sources of this article were taken from various sources, such as: books, journals, research papers, thesis and dissertations, that matched the topics discussed. Then, the secondary data obtained were presented in the form of descriptive exposure by summarizing some of the references relating to the topic. This article is expected to be a solution of development of social policies and programs for poverty alleviation in order to improve the well-being of coastal communities.

Keywords: *identification, the role of poverty, empowerment, social policies and programs.*

PENDAHULUAN

Penanganan kemiskinan di Indonesia sudah lama menjadi agenda nasional. Mengatasi kemiskinan, bukan menjadi tanggung jawab

pemerintah saja tetapi perlu dipecahkan bersama. Kemiskinan kerap mendorong munculnya - sosial lainnya, kondisi kemiskinan tersebut merupakan salah satu penyebab

munculnya - sosial yang lainnya, seperti kesehatan, kriminalitas, konflik keluarga maupun konflik sosial dan pendidikan serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah merupakan salah satu dampak dari yang muncul akibat kemiskinan.

Mengatasi masalah kemiskinan Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Kemiskinan masih menjadi problem klasik meski dari tahun ke tahun pengentasannya menjadi target dalam program pembangunan nasional. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2017 penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan mencapai 27,77 juta orang (10,64% dari jumlah total penduduk). Menurut Kepala BPS Suhariyanto, angka tersebut bertambah 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70%). Meski secara presentase angka kemiskinan mengalami penurunan, namun secara jumlah angka tersebut mengalami kenaikan. "Ini sebenarnya karena pertumbuhan penduduk yang naik saja dari tahun ke tahun. Sekarang kan jumlah penduduk 261 juta. Ini kan tiap hari juga berubah karena ada faktor kelahiran dan kematian," kata Suhariyanto di kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin 17 Juli 2017. (Tempo.Co. Bisnis)

Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan dan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dalam ketentuan umum menjelaskan definisi-definisi, diantaranya pada Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Penjelasan mengenai kebutuhan dasar juga dituliskan dalam Pasal 1 ini, kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial. Masih dalam Bab 1, Pasal 2 dituliskan tentang, Penanganan fakir miskin berasaskan: a. kemanusiaan; b. keadilan sosial; c. nondiskriminasi; d. kesejahteraan; e. kesetiakawanan; dan f. pemberdayaan.

Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi warga masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi individu maupun keluarganya. Dilihat dari standar kebutuhan hidup yang layak atau pemenuhan kebutuhan pokok, kemiskinan merupakan situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, perumahan, yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum.

Secara umum, kemiskinan disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, infrastruktur. Di samping itu, kurangnya kesempatan berusaha,

kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan pengeluaran biaya hidup cenderung boros, menyebabkan posisi tawar masyarakat miskin semakin lemah. Ambar (2004), berpendapat bahwa pengertian kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya, sehingga dalam setiap aktivitas maupun usaha menjadi sangat terbatas.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas wilayahnya 70% merupakan wilayah lautan. Di wilayah lautan ini terkandung potensi ekonomi kelautan yang sangat besar dan beragam, antara lain sumber daya perikanan. Potensi perikanan didukung oleh adanya ekosistem terumbu karang, dan hutan bakau yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi serta bernilai ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah yang sering disebut wilayah pesisir.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan provinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota.

Sedangkan masyarakat pesisir adalah kelompok orang atau suatu komunitas yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut

lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier factor sarana produksi perikanan. Dalam bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa transportasi dan lain-lain. Masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang memiliki karakteristik tersendiri, berbeda dengan masyarakat di wilayah perdesaan dan atau wilayah perkotaan (Rizki, 2012).

Wilayah lautan di Indonesia yang sangat besar dan luas, dari potensi besar lautan justru kemiskinan banyak terdapat di wilayah pesisir, khususnya masih banyak kemiskinan melanda kehidupan nelayan kecil. Menurut Ferry Joko Juliantono (2015) beberapa peran teknis yang menghambat kesejahteraan nelayan, antara lain sebagian besar masih nelayan tradisional dengan karakteristik sosial budaya yang belum kondusif. Kemudian, struktur armada penangkapan yang masih didominasi usaha kecil/tradisional dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah. Dari jumlah itu, hanya 4.487 unit kapal yang tergolong modern, sedangkan 241.889 unit kapal ikan masih berupa perahu tanpa motor.

Selanjutnya disebutkan diantara kategori pekerjaan terkait dengan kemiskinan, nelayan sering disebut sebagai masyarakat termiskin dari kelompok masyarakat lainnya sebagai petani. Bahkan menurut Mubyarto (1984), jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain di sektor pertanian, nelayan (terutama buruh nelayan dan nelayan tradisional) dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin, walaupun tidak dapat dikatakan semua nelayan itu miskin.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015, jumlah kemiskinan di daerah pesisir mencapai 32,14% dari total jumlah penduduk miskin nasional, sementara jumlah penduduk miskin nasional menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2015 mencapai

28,59 juta orang, maka dapat kita ketahui bahwa data kemiskinan di daerah pesisir pada tahun 2015 mencapai 7,18 juta orang (BPS 2015).

Kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial (Suharto, 2009). Oleh karena itu, harus diketahui akar yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan pada nelayan. Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan nelayan atau masyarakat pinggiran pantai, diantaranya; Kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat *top down* dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan subjek.

Kondisi bergantung pada musim sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan nelayan, terkadang beberapa pekan nelayan tidak melaut dikarenakan musim yang tidak menentu. Rendahnya Sumber Daya Manusia (Sumber daya manusia) dan peralatan yang digunakan nelayan berpengaruh pada cara dalam menangkap ikan, keterbatasan dalam pemahaman akan teknologi, menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan yang mengakibatkan pada hasil tangkapan ikan sedikit tentunya berdampak pula pada pendapatan yang akan didapat.

Selain itu penelitian Mujiyadi, dkk (2013), dari hasil *needs assessment*, diketahui bahwa masyarakat miskin pesisir perlu diberdayakan sedemikian rupa. Dari sisi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, mereka sangat tergantung dari pemanfaatan hasil melaut dan dikatakan masyarakat miskin bekerja dan mencari nafkah melalui penangkapan ikan dan pekerjaan lain di laut setempat. Dari hasilnya, sebagian besar hanya cukup untuk

memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang meliputi sandang, pangan, dan tempat tinggal. Untuk pemenuhan kebutuhan sekunder seperti kesehatan, pendidikan anak sekolah, dan aktualisasi diri belum menjadi prioritas untuk dipenuhi. Dengan melihat kondisi tersebut perlu kiranya masyarakat miskin pesisir pantai diberikan peningkatan usaha kesejahteraannya melalui pemberdayaan.

Bertolak dari peran kemiskinan masyarakat pesisir tersebut, artikel ini ditulis dengan tujuan guna mengidentifikasi kemiskinan masyarakat pesisir dan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara sosial maupun ekonomi bagi masyarakat pesisir melalui pemberdayaan. Kondisi kemiskinan di pesisir pantai tersebut kiranya perlu temukenali dengan tepat. Melalui tulisan ini akan diperoleh informasi identifikasi peran sosial terutama kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan, dan potensi sumber daya yang dimiliki masyarakat pesisir. Artikel ini diharapkan sebagai bahan solusi pengembangan kebijakan dan program sosial penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat pesisir.

PEMBAHASAN

Deskripsi Karakteristik Masyarakat Pesisir

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Horton et. al. (1993) mendefinisikan masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, cukup lama hidup bersama, mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya di dalam kelompok tersebut. Linton (1956), yang

dikutif Satria (2001), mengartikan masyarakat sebagai kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan secara jelas. Sementara Soekanto (1990) menjelaskan unsur-unsur masyarakat sebagai berikut: a) manusia hidup bersama, b) bercampur dalam waktu yang lama, c) sadar sebagai satu kesatuan, d) sadar sebagai suatu sistem hidup bersama. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat terbentuk karena adanya sekumpulan manusia yang mendiami wilayah tertentu dengan kehidupan secara bersama sama sebagai satu kesatuan untuk melakukan kegiatan bersama demi kelangsungan kehidupannya dengan waktu yang lama.

Adapun wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah daratan yang berbatasan dengan laut, batas di daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, angin laut dan intrusi garam, sedangkan batas di laut ialah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan (Bengen, 2001). Masyarakat pesisir pantai terkenal dengan perwatakannya yang sangat keras. Ini bukan tanpa sebab, tetapi dikarenakan pola hidup mereka yang sangat tergantung dengan alam.

Selanjutnya disebut masyarakat pesisir adalah sekelompok masyarakat yang dipengaruhi oleh laut, baik sebagian besar atau pun seluruh kehidupannya. Mata pencaharian utama di daerah pesisir adalah sebagai nelayan, walaupun terdapat mata pencaharian di luar nelayan. Menurut Nikijuluw (2001), yang dimaksud masyarakat pesisir adalah kelompok

orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir; mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, pemasok faktor sarana produksi perikanan. Dalam bidang nonperikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi, serta kelompok lainnya yang memanfaatkan sumber daya nonhayati laut dan pesisir untuk menyokong kehidupannya.

Selain itu Lewaherilla (2002) mengungkapkan, masyarakat pesisir adalah sekelompok warga yang tinggal di wilayah pesisir yang hidup bersama dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari sumber daya di wilayah pesisir laut. Demikian pula jenis mata pencaharian yang memanfaatkan sumber daya alam atau jasa-jasa lingkungan yang ada di wilayah pesisir seperti nelayan, petani ikan, dan pemilik atau pekerja industri maritim. Masyarakat pesisir yang didominasi oleh usaha perikanan pada umumnya masih berada pada garis kemiskinan, mereka tidak mempunyai pilihan mata pencaharian, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, tidak mengetahui dan menyadari kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

Demikian luasnya wilayah laut di Indonesia sehingga mendorong masyarakat yang hidup di sekitar wilayah laut memanfaatkan sumber kelautan sebagai tumpuan hidupnya. Ketergantungan masyarakat terhadap sektor kelautan ini memberikan identitas tersendiri sebagai masyarakat pesisir dengan pola hidup dan karakteristik tersendiri. Masyarakat yang mendiami wilayah pesisir merupakan entitas sosial, ekonomi, ekologi, dan budaya, yang menjadi batas antara daratan dan lautan, di mana di dalamnya terdapat suatu kumpulan manusia yang memiliki pola hidup dan tingkah

laku serta karakteristik tertentu. Masyarakat pesisir ini menjadi tuan rumah di wilayah pesisir sendiri. Mereka menjadi pelaku utama perekonomian dalam pembangunan kelautan dan perikanan, serta pembentuk suatu budaya dalam kehidupan masyarakat pesisir.

Masyarakat pesisir itu sendiri merupakan sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama yang mendiami suatu wilayah pesisir, membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Tentu masyarakat pesisir tidak hanya nelayan, melainkan juga pembudidaya ikan, pengolah ikan bahkan pedagang ikan. Terkadang masyarakat pesisir (*Costal Community*) juga diterjemahkan dengan ciri-ciri utama tidak memproduksi barang ataupun jasa tertentu, biasanya berupa perahu dengan sistem ekonomi yang hirarki seperti ada juragan kapal, tengkulak, buruh, nelayan, tradisional (Wignyosoebroto, 2009).

Dari beberapa kajian disebutkan, masyarakat pesisir pada umumnya sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pemanfaatan sumber daya kelautan (*marine resource based*), seperti nelayan penangkap ikan, pembudidaya ikan, penambangan pasir dan transportasi laut. Tingkat pendidikan penduduk wilayah pesisir juga tergolong rendah. Kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumber daya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Hal ini juga dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat pesisir yang mempunyai jenis

kegiatan usaha yang dominan dilakukan yaitu usaha tangkap ikan di laut, pengolahan hasil perikanan, tambak ikan dan usaha jasa lainnya yang ada disekitarnya. Selain itu struktur masyarakat yang masih sederhana baik budaya, tatanan kehidupan dan kegiatan masyarakatnya relatif homogen yang mempunyai kesamaan dalam melaksanakan norma kehidupan yang berlaku. Kondisi lain yang menjadi pengaruh dalam kehidupan masyarakat pesisir adalah faktor lingkungan, musim dan pasar.

Menurut hasil penelitian maupun kajian yang sudah ada, banyak diantaranya faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat pesisir menjadi suatu komunitas yang terbelakang atau bahkan terisolasi sehingga masih jauh untuk menjadikan semua masyarakat setempat sejahtera. Dilihat dari faktor internal masyarakat pesisir masih rendahnya terhadap teknologi yang maju dan canggih dan tidak tepatnya pengelolaan sumber daya yang ada dengan kultur masyarakat setempat. Berbeda halnya dengan masyarakat pesisir yang mata pencahariannya didominasi dengan mencari ikan di laut atau usaha pengolahan hasil tangkapan ikan. Nelayan bergelut dengan alam yang bergantung dengan cuaca dan lautan untuk mendapatkan tangkapan ikan yang banyak sebagai penghasilan bagi keluarga mereka, maka pendapatan yang mereka inginkan tidak dapat ditentukan. Berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris yang ada di perkebunan. Dari segi penghasilan, petani mempunyai pendapatan yang dapat ditentukan dengan pola panen yang ada musimnya yang dapat dengan dikontrol dengan modal dan hasil, sehingga hasil pangan atau ternak yang mereka miliki dapat diatur untuk menghasilkan pendapatan yang mereka inginkan.

Nelayan menghadapi kemampuan sebagai sumber daya yang bersifat *open acces* dan beresiko tinggi. Hal tersebut menyebabkan masyarakat pesisir seperti nelayan memiliki

karakter yang tegas, keras, dan terbuka”. Hal ini ditegaskan Pollnack dalam Satria (2001), bahwa masyarakat nelayan perikanan tangkap bersifat *open acces* sehingga nelayan juga harus berpindah-pindah dan terdapat elemen risiko yang harus dihadapi lebih besar dari pada yang risiko yang harus dihadapi oleh petani.

Selain itu Rizki (2012), mengungkapkan karakteristik masyarakat pesisir dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya, aspek pengetahuan, kepercayaan (teologis), dan posisi sosial nelayan. Dilihat dari aspek pengetahuan, masyarakat pesisir mendapat pengetahuan dari warisan nenek moyangnya misalnya mereka untuk melihat kalender dan penunjuk arah maka mereka menggunakan rasi bintang. Sementara, dilihat dari aspek kepercayaan, masyarakat pesisir masih menganggap bahwa laut memiliki kekuatan magic sehingga mereka masih sering melakukan adat pesta laut atau sedekah laut. Namun, dewasa ini sudah ada dari sebagian penduduk yang tidak percaya terhadap adat-adat seperti pesta laut tersebut. Mereka hanya melakukan ritual tersebut hanya untuk formalitas semata. Begitu juga dengan posisi sosial nelayan, pada umumnya, nelayan bergolong kasta rendah.

Karakteristik penting lain dari masyarakat pesisir, khususnya nelayan adalah adanya stratifikasi sosial ekonomi dalam komunitas mereka. Sorokin (1962) dalam Satria (2002) misalnya membedakan stratifikasi sosial menjadi tiga jenis yaitu: (1) stratifikasi karena status ekonomi (*economically stratified*); (2) stratifikasi karena perbedaan status politik (*politically stratified*) seperti karena perbedaan gelar kehormatan, kedudukan, jabatan, dll; (3) stratifikasi karena perbedaan status pekerjaan (*occupationally stratified*).

Masih dalam Rizki (2012) secara sosiologis, masyarakat pesisir memiliki ciri yang khas

dalam hal struktur sosial yaitu kuatnya hubungan antara patron dan klien dalam hubungan pasar pada usaha perikanan. “Biasanya patron memberikan bantuan berupa modal kepada klien. Hal tersebut merupakan taktik bagi patron untuk mengikat klien dengan utangnya sehingga bisnis tetap berjalan”. Dari utang piutang tersebut sering terjadi konflik, namun konflik yang mendominasi adalah persaingan antar nelayan dalam memperebutkan sumber daya ikan yang jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, sangatlah penting adanya pihak yang dapat mengembangkan sumber daya laut dan mengatur pengelolaannya.

Kemiskinan Masyarakat Pesisir

Kemiskinan diyakini sebagai akar peran hilangnya martabat manusia, hilangnya keadilan, belum terciptanya masyarakat madani, tidak berjalannya demokrasi, dan terjadinya degradasi lingkungan. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soekanto, 2006).

Kemiskinan sering disebut sebagai kondisi sosial ekonomi warga masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Secara umum, kemiskinan masyarakat disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan akan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, infrastruktur. Faturochman, et.al (2007) mengungkapkan bahwa kemiskinan di tandai dengan 1) Sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan tak dapat diubah, yang tercermin di dalam lemahnya kemauan untuk maju. 2) Rendahnya sumber daya kualitas manusia 3) Lemahnya nilai tukar

hasil produksi 4) Rendahnya produktivitas 5) Terbatasnya modal dimiliki 6) Rendahnya pendapatan 7) Terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Kemiskinan diyakini sebagai akar peran hilangnya martabat manusia, hilangnya keadilan, belum terciptanya masyarakat madani, tidak berjalannya demokrasi, dan terjadinya degradasi lingkungan.

Mujiyadi, dkk (2007), menyebutkan bahwa kemiskinan sangat terkait dengan berbagai latar belakang baik yang ada dalam diri masyarakat maupun lingkungannya yang meliputi aspek sosial budaya, sumber daya, kondisi alam dan lain-lain. Kemiskinan di Indonesia setidaknya mempunyai empat dimensi pokok yakni: 1) Kurang kesempatan, 2) Rendah kemampuan, 3) Kurang jaminan, 4) Ketidakberdayaan. Dilihat dari empat dimensi dimaksud, kemiskinan disebabkan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan sosialnya serta kebutuhan akan aktualisasi diri secara layak.

Masyarakat pesisir merupakan suatu komunitas yang hidup di wilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dengan sumber daya pesisir. Masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang masih terbelakang dan berada dalam posisi marginal. Selain itu, banyak dimensi kehidupan yang tidak diketahui oleh orang luar tentang karakteristik masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir mempunyai cara berbeda dalam aspek pengetahuan, kepercayaan, peranan perempuan, dan struktur sosialnya (Satria, 2002). Sementara itu, dibalik kemarginalannya, masyarakat pesisir tidak mempunyai banyak cara dalam mengatasi yang hadir. Masalah kompleks yang dihadapi masyarakat pesisir adalah kemiskinan, keterbatasan pengetahuan untuk pengelolaan sumber daya dan teknologi, serta peran aktif antara pihak luar dengan masyarakat pesisir sehingga dapat menghidupkan kualitas dan keterampilan masyarakat pesisir tanpa melunturkan karakter budayanya.

Seperti yang kita ketahui masyarakat pesisir dapat kita cirikan dengan jenis usahanya yaitu nelayan, pembudidaya ikan, dan pedagang merupakan kelompok masyarakat pesisir yang secara langsung mengusahakan dan memanfaatkan sumber daya ikan melalui kegiatan penangkapan dan budidaya. Kelompok ini pula yang mendominasi pemukiman di wilayah pantai pada pulau-pulau besar dan kecil di Indonesia (Nikijuluw, 2001). Masyarakat pesisir ada yang menjadi pengusaha skala kecil dan menengah, namun lebih banyak dari mereka yang bersifat subsistem, menjalani usaha dan kegiatan ekonominya untuk menghidupi keluarga sendiri, dengan skala yang begitu kecil sehingga hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.

Dijelaskan juga bahwa dari sisi usaha perikanan, kelompok masyarakat pesisir yang miskin terdiri dari rumah tangga perikanan yang menangkap ikan tanpa menggunakan perahu, menggunakan perahu tanpa motor, dan perahu bermotor tempel. Dengan skala usaha seperti ini, nelayan hanya mampu menangkap ikan di daerah dekat pantai. Dalam kasus tertentu, nelayan dapat bekerja sama atau bermitra dengan perusahaan besar, sehingga mereka dapat pergi menangkap ikan lebih jauh dari pantai (Nikijuluw, 2001). Namun demikian, peningkatan penghasilan dari hasil kerja sama ini tidak banyak berarti karena jumlah anggota rumah tangga yang besar menyebabkan jumlah penghasilan mereka belum mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Persoalan kemiskinan masyarakat pesisir bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik bahkan juga ideologi. Berbagai fenomena yang ada terlihat bahwa ketidakberdayaan masyarakat pesisir disebabkan oleh tiga hal yaitu: 1) kemiskinan struktural; 2) kemiskinan super-struktural; dan 3) kemiskinan kultural (Suharto, 2009).

Kemiskinan struktural berkaitan dengan pengaruh faktor-faktor luar (eksternal) seperti sosial ekonomi masyarakat dan ketersediaan insentif, fasilitas pembangunan dan teknologi. Kemiskinan super struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan makro yang tidak pro pembangunan masyarakat pesisir seperti kebijakan pemerintahan yang berupa proyek dan program pembangunan. Sementara itu kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang berkaitan dengan keadaan yang melekat pada masyarakat pesisir seperti gaya hidup, tingkat pendidikan, budaya, adat, serta kepercayaan.

Secara spesifik Raharjdo (1999) menjelaskan kemiskinan yang terjadi di masyarakat pesisir mempunyai ciri yang sangat menonjol dari kehidupan masyarakat pesisir di Indonesia, khususnya nelayan. Secara umum nelayan lebih miskin dibanding petani. Hal ini terutama disebabkan oleh: 1) Tantangan alam yang dihadapi nelayan sangat berat, termasuk faktor musim, 2) Pola kerja yang homogen dan bergantung hanya pada satu sumber penghasilan, 3) Keterbatasan penguasaan modal, perahu, dan alat tangkap 4) Keadaan pemukiman dan perumahan yang tidak memadai, 5) Karakteristik sosial-ekonomi belum mengarah pada sektor jasa lingkungan, seperti kegiatan wisata.

Kemiskinan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, lebih banyak disebabkan karena faktor sosial-ekonomi yang terkait karakteristik sumber daya dan teknologi yang digunakan. Smith (1979) dan Anderson (1979) dalam Afrizal (2011), berkesimpulan bahwa kekuatan aset perikanan adalah alasan utama kenapa nelayan tetap bergelut dengan kemiskinan dan sepertinya tidak ada upaya mereka untuk keluar dari kemiskinan itu. Kekakuan aset adalah sifat aset perikanan yang sulit untuk dilikuidasi atau diubah bentuk dan fungsinya untuk digunakan

bagi kepentingan lain. Akibatnya, pada saat produktivitas aset tersebut rendah, nelayan tidak mampu untuk mengalihfungsikan atau melikuidasi aset tersebut. Oleh sebab itu, meskipun rendah produktivitas, nelayan tetap melakukan operasi penangkapan ikan yang sesungguhnya tidak lagi efisien secara ekonomis.

Subade dan Abdullah (1993) dalam Kusnadi (2006), mengemukakan pendapat lain, bahwa nelayan bertahan pada industri perikanan karena terbatasnya *opportunity cost* mereka. *Opportunity cost* nelayan adalah kemungkinan lain yang bisa dikerjakan nelayan bila saja mereka tidak menangkap ikan. Bila *opportunity cost* rendah, maka nelayan cenderung tetap melaksanakan usahanya meskipun usaha tersebut tidak lagi menguntungkan dan efisien. Kemudian Panayotou (1982) menekankan bahwa nelayan lebih senang memiliki kepuasan hidup yang diperoleh dari hasil menangkap ikan dibandingkan kegiatan yang hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan. Jalan hidup seperti ini sulit untuk mengeluarkan nelayan dari kemiskinan karena nelayan merasa sudah bahagia dengan kehidupan itu.

Disebutkan Imron (2003) tidak dipungkiri, sebenarnya para nelayan akan selalu berusaha untuk memaksimalkan pendapatannya melalui usaha peningkatan teknologi. Dengan demikian, pemilikan teknologi yang eksploitatif sifatnya, yaitu yang paling efektif dan efisien bisa dikatakan merupakan obsesi dari setiap orang yang menekuni pekerjaan sebagai nelayan. Akan tetapi, hal demikian tidak selamanya bisa dilakukan. Hal ini karena terkait dengan faktor modal yang relatif besar, yang sangat mempengaruhi tingkat teknologi yang dimiliki oleh nelayan. Nelayan yang memiliki modal besar akan dapat membeli alat tangkap yang lebih bervariasi dengan tingkat eksploitasi

yang lebih besar dibandingkan nelayan dengan modal yang kecil. Lebih parah lagi jika nelayan itu tidak punya modal, justru akan menempatkannya dalam posisi hanya sebagai buruh nelayan.

Adapun kondisi kemiskinan nelayan dapat digambarkan seperti yang ditulis oleh Iberahim (2013) dalam penelitiannya, dikarenakan: a) Masih menggunakan perahu dayung sampan untuk melakukan aktifitas penangkapan di laut. b) Memiliki banyak tanggungan keluarga namun sumber pendapatan keluarga hanya mengandalkan kepala keluarga. c) Dilihat dari kondisi rumah, maka rumah nelayan yang dikategorikan miskin yaitu rumah yang masih beratapkan daun nipah dengan dinding semi permanen dari kayu dan biasanya sudah tua karena rumah warisan dari orang tua. d) Dilihat dari kapal yang dimiliki, maka nelayan yang dikategorikan miskin secara lokal yaitu nelayan yang mesin kapalnya sudah tua dan bentuk kapalnya tidak bersih akibat jarang dirawat seperti di cat karena perawatan kapal membutuhkan waktu kurang lebih satu minggu untuk tidak menurunkan kapal tersebut ke laut, sehingga nelayan yang miskin jarang merawat kapalnya karena harus mencari nafkah di laut. e) Dilihat dari kepemilikan harta benda, maka nelayan yang dikatakan miskin secara lokal yaitu nelayan yang tidak memiliki alat elektronik maupun kendaraan bermotor.

Seperti yang diungkapkan oleh Kristiadi (2008) dalam Tukiran (2015) bahwa gambaran kemiskinan, kelaparan, gizi buruk, kekurangan energi kronis, dan morbiditas dialami sebagian besar penduduk Indonesia dan penduduk di daerah pesisir. Kondisi ini jauh lebih parah dibandingkan dengan daerah lainnya. Sedemikian miskinnya penduduk pesisir sehingga pembagian beras *bulukan* tetap ditunggu-tunggu bahkan harus rela antre berjam-jam. Nasi *aking* dengan lauk ikan

asin menjadi santapan mewah sehari-hari. Barisan antre minyak goreng, minyak tanah, serta penerima raskin dan sembako semakin bertambah panjang hampir sampai ke bibir pantai. Kemiskinan yang sangat kronis jelas lebih tampak di wilayah pesisir dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Kemudian hal lain yang menyebabkan menjadi miskin disebutkan dari beberapa literatur hasil penelitian, masyarakat nelayan pesisir pantai gaya hidupnya masih konsumtif, royal atau boros disaat musim tangkap ikan banyak. Perilaku ini dikatakan wajar dan sudah menjadi suatu kebiasaan yang terjadi sejak dahulu sampai sekarang dan terus berlanjut. Disebutkan Purwanti dan Wulandari (2013) alasan Nelayan mempertahankan gaya hidup konsumtif, karena harga diri yang tinggi dan gengsi akan menyebabkan seseorang rela melakukan apa saja untuk menutupi kekurangannya, struktur sosial didalam masyarakat yang mengharuskan mereka untuk tetap mempertahankan perilaku atau gaya hidup konsumtif demi status mereka terutama sebagai nelayan juragan, karena iri dengan juragan lainnya, sikap manusia yang cenderung meniru perilaku manusia lainnya maka hal ini dapat menyebabkan seseorang ingin meniru atau menyamai bahkan melebihi apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Pewarisan yang sebelumnya menjadi ikatan konsumsi dari stabilitas struktur sosialnya atau dengan kata lain gaya hidup konsumtif didapatkan dari keluarga mereka yang dulu juga menganut perilaku yang sama.

Adapun kemiskinan masyarakat pesisir yang disebabkan oleh faktor internal, seperti: 1) Teknologi penangkapan yang masih tradisional yang masih banyak menggunakan perahu tanpa motor dan perahu motor tempel yang hanya bisa menangkap ikan di sekitar perairan dekat pantai; 2) Modal yang tidak memadai,

karena untuk menangkap ikan dengan jumlah banyak dibutuhkan modal yang besar sehingga membutuhkan modal usaha dan modal investasi; 3) Sumber Daya Manusia yang minim pengetahuan, Dilihat dari tingkat pendidikannya masih rendah, sebagian besar nelayan Indonesia merupakan tamatan SD bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan formal sekalipun. Hal ini akan berimplikasi pada tingkat penerimaan nelayan rendah, terhadap teknologi terbaru yang maju dan canggih.

Kemudian faktor eksternal kemiskinan masyarakat pesisir disebabkan, 1) Terjadinya perubahan sumber potensi ikan, karena faktor alam yang tidak terduga, 2) Sarana dan prasarana yang tidak mendukung atau tidak memadai, seperti tempat berlabuh perahu, sarana tempat jual atau lelang ikan Pusat Pelelangan Ikan (PPI) hasil tangkapan nelayan, sarana kegiatan perekonomian masyarakat nelayan dan sarana pusat penyuluhan dan pembinaan untuk nelayan, 3) Kebijakan Pemerintah yang kurang mendukung pada nelayan, seperti kurang dukungan pemerintah terhadap sektor pengembangan perikanan, banyak PPI yang dialih fungsikan menjadi sarana pariwisata.

Dari beberapa pendapat yang dijelaskan diatas dapat kita tarik beberapa persoalan yang menyebabkan masyarakat pesisir masih dikategorikan sebagai masyarakat miskin, yaitu Peran masyarakat pesisir pada dasarnya berpangkal pada rendahnya produktifitas nelayan dalam usaha penangkapannya. Hal ini diduga disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan internal nelayan yaitu faktor kemampuan nelayan dalam meningkatkan kapasitas penangkapan serta masih banyak masyarakat pesisir yang gaya hidupnya masih konsumtif di saat tangkap ikan banyak dan faktor eksternal nelayan yaitu faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya akses yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang kurang tepat.

kemiskinan masyarakat pesisir ini kiranya perlu perhatian dari berbagai pihak untuk mengupayakan berbagai cara baik melalui pemberdayaan, pemberian bantuan usaha, maupun pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat pesisir untuk menanggulangi peran kemiskinan yang ada dan untuk meningkatkan taraf hidup yang sejahtera. Untuk mengatasi hal itu, diperlukan pendekatan yang terintegrasi antara berbagai elemen termasuk dukungan kebijakan dan politik. Jalan pintas untuk dapat keluar dari kemiskinan masyarakat pesisir adalah mengubah kebijakan pemerintahan yang peduli terhadap pembangunan daerah pesisir, utamanya sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mengelola secara optimal sumber daya alam di daerah pesisir yang cukup melimpah.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Sudah menjadi sifat manusia bahwa manusia dalam memenuhi hidupnya harus berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik. Dalam interaksi ini ada berbagai masalah yang timbul dan harus dipecahkan. Dalam kehidupan masyarakat miskin pesisir pantai, sangat berkaitan dengan kelautan dan harus berinteraksi dengan laut. Mereka memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar laut untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Sistem mata pencaharian mereka pada umumnya adalah nelayan tradisional dan subsistem. Bila dilihat dari potensi yang tersedia masih banyak lahan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya, seperti kawasan yang indah buat wisata, peluang untuk berjualan dan usaha-usaha lainnya.

Namun karena keterbatasan kemampuan dan keterampilan mereka dalam mengolah sumber daya alam yang masih tradisional sehingga pemanfaatannya masih terbatas. Sementara bimbingan atau latihan keterampilan

dari pemerintah setempat masih belum terjangkau sehingga mereka selama ini hanya mengandalkan kemampuan yang sudah dimiliki dari leluhurnya, sehingga hasil yang didapat atau hasil yang diproduksi hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara terbatas. Didasarkan pada kondisi kehidupan ekonomi yang sudah dipaparkan diatas kiranya masyarakat miskin pesisir perlu diberikan penguatan peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan yang tepat.

Sebagai suatu strategi pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan didefinisikan sebagai kegiatan membantu individu untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri mereka untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya yang ada dalam lingkungannya (Payne dalam Adi 2001).

Sementara itu Ife (1995) memberikan batasan pemberdayaan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka. Dengan demikian pemberdayaan yang dikaitkan dengan kemiskinan dapat disebutkan sebagai proses peningkatan kondisi kehidupan dan penghidupan yang ditujukan kepada masyarakat miskin dengan mendayagunakan atau menguatkan potensi yang dimiliki individu dan potensi sumber daya lainnya yang terdapat di sekitar lingkungannya. Menurut Mubarak (2010) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas

untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat. Sehingga dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta, yang mengharuskan masyarakat berperan aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan.

Masyarakat di sekitar pantai merupakan salah satu pihak yang harus berperan serta dalam konservasi pelestarian biota laut. Namun karena ketidak berdayaan (yang antara lain karena kemiskinan) kelompok ini sebagian besar masih perlu diberdayakan sedemikian rupa. Kelompok masyarakat ini masih perlu ditingkatkan kesejahteraan sosialnya agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Secara minimal masyarakat ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yang meliputi kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritualnya.

Selama ini potensi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dimiliki oleh suatu daerah belum dimanfaatkan secara optimal sebagai kawasan yang dapat diandalkan untuk menopang perekonomian daerah. Padahal jika dimanfaatkan seoptimal mungkin maka akan memiliki posisi strategis didalam struktur alokasi dan sumber daya ekonomi daerah. Menurut Rahmalia (2003) dalam Surachman, (2015) nilai ekonomi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil mengandung sekurang-kurangnya tiga unsur *economic rent* yaitu *ricardian rent*, *environmental rent*, dan *social rent*. *Ricardian rent* adalah rent berdasarkan kekayaan dan kesesuaian sumber daya yang dimiliki untuk berbagai penggunaan aktivitas ekonomi, seperti kesesuaiannya untuk budidaya tambak, kesesuaian fisik untuk pengembangan

pelabuhan, dan sebagainya. *Environmental rent* kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil adalah nilai atau fungsi kawasan yang didasarkan atas fungsinya terhadap keseimbangan lingkungan. Sedangkan *social rent* adalah menyangkut manfaat kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk berbagai fungsi sosial seperti nilai-nilai budaya masyarakatnya.

Surachman (2015) menyebutkan pula, bahwa berbagai sektor dapat dikembangkan dalam upaya memajukan dan memakmurkan perekonomian negara, mulai dari perikanan tangkapperikananbudidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi maritim, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, angkutan laut, jasa perdagangan, industri maritim, pembangunan maritim (konstruksi dan rekayasa), benda berharga dan warisan budaya (*cultural heritage*), jasa lingkungan konservasi sampai dengan biodiversitasnya. Oleh karena itu setiap Desa Pesisir di Indonesia seharusnya mengarah pada konsep pembangunan yang terintegrasi antara potensi daratan dan potensi kelautan sehingga pada akhirnya Laut yang ada tidak menjadi hambatan namun menjadi peluang untuk pembangunan di desa-desa tersebut.

Penerapan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk program penanggulangan kemiskinan di wilayah pesisir. Pelaksanaan program penanganan kemiskinan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah tercantum dalam Bab IV Penanganan Fakir Miskin Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam peraturan pemerintah ini

disebutkan upaya penanganan fakir miskin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan melalui: 1) Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dan sumber daya laut; 2) Bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha; 3) penguatan lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan; 4) Pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/ atau 5) peningkatan keamanan berusaha dan pengamanan sumber daya kelautan dan pesisir.

Berkaitan dengan peraturan pemerintah dalam upaya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pesisir yang menekankan pada pemberdayaan, ada beberapa peluang yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat pesisir, yaitu dalam pengelolaan sumber daya ditekankan pada manajemen yang berpola berbasis masyarakat, kemudian diterapkan paradigma *good governance*, bukan pemerintahan yang kuat atau penguasa wilayah, selanjutnya masyarakat diberikan motivasi serta penyuluhan untuk membangun kesadaran bahwa bantuan pemerintah yang diberikan selama ini adalah bersumber dari dana pinjaman yang tentunya masyarakat sendirilah yang harus memanfaatkan sebagai modal untuk mendapatkan penghasilan dan tentunya juga harus bisa menanggung beban pengembalian pinjaman. Kemudian menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat, bahwa adanya kebanggaan dari masyarakat kalau mereka sebenarnya mampu menemu-kenali, dan lain-lainnya, bahkan mereka mampu mengelola sehingga menunjukkan hasil.

Yang terpenting juga dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat sudah mampu berperan sebagai pengawas dan melakukan kordinasi dengan instansi terkait demi kesuksesan tersebut. Masyarakat nelayan harus diberi kesempatan dan kewenangan untuk mandiri dan memutuskannya sendiri terhadap

apa yang dikehendakinya tanpa diintervensi. Selain itu masyarakat nelayan juga diberi ruang untuk mengembangkan *civil society*-nya sendiri secara partisipatif dan demokratis.

Dimensi dan Prinsip-prinsip Pemberdayaan Sosial Pesisir Pantai

Disebutkan Ambo (2011), bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir paling tidak memiliki dua dimensi pokok, yaitu dimensi kultural dan struktural. Dimensi kultural mencakup upaya-upaya perubahan perilaku ekonomi, orientasi pendidikan, sikap terhadap perkembangan teknologi, dan kebiasaan-kebiasaan. Sedangkan dimensi struktural mencakup upaya perbaikan struktur sosial sehingga memungkinkan terjadinya mobilitas vertikal nelayan. Perbaikan struktural tersebut umumnya berupa penguatan solidaritas nelayan untuk selanjutnya dapat berhimpun dalam suatu kelompok dan organisasi yang mampu memperjuangkan kepentingan mereka.

Selanjutnya Ambo (2011), juga menyatakan dalam pemberdayaan nelayan secara struktural maupun kultural, perlu dipahami adanya keunikan karakteristik sosial nelayan yang tentunya menuntut adanya pendekatan pemberdayaan yang unik pula. Ada beberapa prinsip dan pendekatan penting dalam pemberdayaan yang digunakan untuk seluruh konteks komunitas nelayan, yaitu:

Prinsip Pemberdayaan

1. Prinsip Tujuan

Pemberdayaan harus dilandasi tujuan yang jelas, dimana nelayan harus dianggap sebagai subyek dalam pembangunan sehingga pendekatan yang dilakukan adalah membantu para nelayan agar dapat membantu dirinya sendiri dengan pendidikan dan pelatihan. Hal ini terdapat di dalam paradigma baru, yang asumsinya

adalah nelayan memiliki kemampuan untuk memecahkan dirinya sendiri.

2. Prinsip Pengetahuan dan Penguatan Nilai Lokal

Pengetahuan modern saat ini seringkali dianggap segala-galanya dan ampuh untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi nelayan, padahal mereka memiliki sistem pengetahuan sendiri yang penting dijadikan bekal dalam pemberdayaan, karena pengetahuan tersebut sudah diwariskan turun-menurun. Begitu pula dengan nilai lokal yang potensial sebagai landasan dalam pemberdayaan. Nilai lokal itu dapat menjadi modal sosial yang penting untuk dikembangkan bagi kemajuan masyarakat nelayan.

3. Prinsip Keberlanjutan

Berdasarkan realita yang terjadi, proyek-proyek pemberdayaan yang sering dilakukan kadangkala terjebak pada paradigma proyek yang mengharuskan tercapainya target secara nyata dalam waktu yang singkat. Dengan demikian, prinsip keberlanjutan seringkali diabaikan dalam proyek-proyek pemberdayaan selama ini dan hal tersebut terjadi karena masih kuatnya paradigma proyek dalam setiap aktivitas pemberdayaan. Inipun terjadi karena memang sifat proyek hanya sesaat dan tidak *multiyears*. Oleh karena itu, perlu dipikirkan perubahan sistem administrasi proyek yang terkait dengan program pemberdayaan agar program pemberdayaan dapat berjalani efektif tanpa batasan administrasi yang seringkali menghambat.

4. Prinsip Ketepatan Kelompok Sasaran

Pihak pelaksana pemberdayaan seringkali mendatangi elite desa yang lebih mudah berkomunikasi meskipun sebenarnya jauh dari persoalan nelayan.

Sementara itu, nelayan miskin yang tidak mudah berkomunikasi malah jarang didatangi. Akibatnya, informasi yang diperoleh justru bias dengan kepentingan informan elite nelayan tersebut, sehingga banyak program pemberdayaan yang hanya menyentuh elite nelayan yang sebenarnya tidak perlu diberdayakan. Oleh karena itu, sudah saatnya pemberdayaan sosial nelayan saat ini berorientasi pada kelompok sasaran yang tepat.

5. Prinsip Kesetaraan Gender

Salah satu ciri sosial nelayan adalah kuatnya peran wanita atau istri nelayan dalam aktivitas ekonomi maupun pengambilan keputusan. Dalam posisi yang demikian, sasaran pemberdayaan harus mencakup istri-istri nelayan juga. Seringkali program pemberdayaan bias kepada laki-laki sehingga laki-laki yang selalu diajak berdiskusi dan memecahkan tanpa melibatkan istri mereka.

Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Dari beberapa hasil kajian dan penelitian yang sudah ada, dikatakan bahwa kekurangberdayaan masyarakat pesisir antara lain disebabkan oleh keterbatasan mereka dalam penguasaan ilmu, teknologi, modal, dan kelembagaan usaha. Seperti yang dikatakan Ambo (2011) mengungkapkan paling tidak ada lima pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir yang bisa saja diimplementasikan. Dengan adanya kelima pendekatan ini tidak berarti bahwa pendekatan lain tidak ada. Kelima pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan, dan potensi sumber daya yang dimiliki masyarakat. Uraian singkat tentang kelima pendekatan program ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Mata Pencaharian Alternatif

Pertama, Pengembangan mata pencaharian alternatif dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa sumber daya pesisir secara umum dan perikanan tangkap secara khusus telah banyak mengalami tekanan dan degradasi. Data empiris menunjukkan bahwa sudah terlalu banyak nelayan yang berkonsentrasi di perairan tertentu. Malahan secara nasional, tampaknya jumlah nelayan juga sudah berlebihan. Potensi ikan laut yang tersedia, kalau memang benar estimasinya, sudah tidak mampu dijadikan andalan bagi peningkatan kesejahteraan. Kalau jumlah ikan yang diperbolehkan ditangkap betul-betul diambil semuanya maka berdasarkan perhitungan kasar secara rata-rata, nelayan sangat sulit untuk sejahtera.

2. Akses Terhadap Modal

Elemen kedua strategi pemberdayaan nelayan adalah pengembangan akses modal. Strategi ini sangat penting karena pada dasarnya saat ini masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan sangat sulit untuk memperoleh modal. Sifat bisnis perikanan yang musiman, ketidakpastian serta risiko tinggi sering menjadi alasan keengganan bank menyediakan modal bagi bisnis ini. Sifat bisnis perikanan seperti ini yang disertai dengan status nelayan yang umumnya rendah dan tidak mampu secara ekonomi membuat mereka sulit untuk memenuhi syarat-syarat perbankan yang selayaknya diberlakukan seperti perlu adanya *collateral*, *insurance* dan *equity*.

3. Akses Terhadap Teknologi

Teknologi yang digunakan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, pada umumnya masih bersifat tradisional. Karena itu

maka produktivitas rendah dan akhirnya pendapatan rendah. Upaya meningkatkan pendapatan dilakukan melalui perbaikan teknologi, mulai dari teknologi produksi hingga pasca produksi dan pemasaran. Upaya-upaya peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi belum banyak dilakukan. Hal ini karena adanya kesulitan untuk mengidentifikasi jenis dan tipe teknologi yang dibutuhkan masyarakat. Seringkali, justru masyarakatlah yang lebih maju dalam mencari dan mengadopsi teknologi yang diinginkan. Sehingga kadang-kadang pemerintah tertinggal. Dengan kata lain, dalam hal teknologi masyarakat lebih maju dari pemerintah.

4. Akses Terhadap Pasar

Pasar adalah faktor penarik dan bisa menjadi salah kendala utama bila pasar tidak berkembang. Karena itu maka membuka akses pasar adalah cara untuk mengembangkan usaha karena bila tidak ada pasar maka usaha sangat terhambat perkembangannya. Untuk mengembangkan pasar bagi produk-produk yang dihasilkan masyarakat pesisir maka upaya yang dilakukan adalah mendekati masyarakat dengan perusahaan-perusahaan besar yang juga adalah eksportir komoditas perikanan. Untuk itu maka kontrak penjualan produk antara masyarakat nelayan dengan perusahaan ini dilaksanakan. Keuntungan dari hubungan seperti ini yaitu masyarakat mendapat jaminan pasar dan harga, pembinaan terhadap masyarakat terutama dalam hal kualitas barang bisa dilaksanakan, serta sering kali masyarakat mendapat juga bantuan modal bagi pengembangan usaha.

5. Pengembangan Aksi Kolektif

Pemberdayaan melalui pengembangan aksi kolektif sama artinya dengan pengembangan koperasi atau kelompok

usaha bersama. Hanya di sini istilah yang digunakan adalah aksi kolektif yaitu untuk membuka kesempatan kepada masyarakat membentuk kelompok-kelompok yang diinginkannya yang tidak semata-mata koperasi atau kelompok usaha bersama.

PENUTUP

Masyarakat pesisir mempunyai cara berbeda dalam aspek pengetahuan, kebiasaan, peranan sosial, sosial budaya, ekonomi, dan struktur sosialnya. Sementara itu, dibalik kemiskinannya, masyarakat pesisir tidak mempunyai banyak cara dalam mengatasi yang dihadapinya terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. kompleksitas yang dihadapi masyarakat pesisir adalah kemiskinan, keterbatasan pengetahuan untuk pengelolaan sumber daya dan teknologi, serta peran aktif antara pihak luar dengan masyarakat pesisir sehingga dapat menghidupkan kualitas dan keterampilan masyarakat pesisir tanpa melunturkan karakter budayanya.

Banyak diantaranya faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat pesisir menjadi suatu komunitas yang terbelakang atau bahkan terisolasi sehingga masih jauh untuk menjadikan semua masyarakat setempat sejahtera. Secara umum, kemiskinan masyarakat pesisir disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, infrastruktur. Di samping itu, kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan gaya hidup yang cenderung boros, menyebabkan posisi tawar masyarakat miskin semakin lemah. Pada saat yang sama, kebijakan Pemerintah selama ini kurang berpihak pada masyarakat pesisir sebagai salah satu pemangku kepentingan di wilayah pesisir.

Dilihat dari faktor internal masyarakat pesisir kurang terbuka terhadap teknologi dan tidak cocoknya pengelolaan sumber daya dengan kultur masyarakat setempat. Kemiskinan masyarakat pesisir ini merupakan persoalan yang hingga saat ini masih menjadi persoalan besar yang harus menjadi perhatian. Tentunya dibutuhkan komitmen yang tinggi dari para *stakeholders* mulai tingkat pusat sampai daerah untuk bersama-sama mengatasi ini. Untuk itu keterlibatan aktif dari berbagai pihak menjadi harapan utama dalam merumuskan format program pemberdayaan yang dapat menjadi rekomendasi atau pedoman bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan pembangunan kawasan pesisir dan masyarakatnya yang disesuaikan dengan karakteristik khas kawasan tersebut.

Pada dasarnya masyarakat pesisir tidak hanya termarginalkan dalam hal geografis, tetapi juga dalam hal keterlibatan dengan pihak luar. Oleh karena itu, untuk menghadapi berbagai peran sosial terutama kemiskinan pada masyarakat pesisir, diperlukan adanya suatu integrasi dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait, baik dari lembaga pendidikan, lembaga swasta ataupun pemerintah dengan masyarakat pesisir untuk memberikan pendidikan dan kegiatan nyata dalam bentuk program pemberdayaan yang berkelanjutan yang dibutuhkan oleh masyarakat pesisir dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Untuk itu, masyarakat pesisir memerlukan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan melalui pemberdayaan. Dengan demikian langkah baiknya pemerintah dan pihak luar tidak hanya memberikan program-program yang instan saja, melainkan memberikan fasilitator yang dapat menampung aspirasi mereka yang di ekspresikan kedalam kerja nyata melalui pemberdayaan yang

berkelanjutan. Oleh karena itu pihak yang akan memberikan program pemberdayaan bagi masyarakat pesisir harus bisa bekerjasama dengan masyarakat pesisir, tidak hanya memberikan stimulan atau barang saja, tetapi patut juga mendengarkan dan mendampingi mereka serta memberikan alternative pemecahan karena masyarakat pesisir sendirilah yang akan memperbaiki kualitas hidup mereka.

Masyarakat pesisir yang memiliki karakter tegas, keras, dan terbuka memerlukan berbagai strategi dan kegiatan yang bersifat fleksibel dan terbuka agar dapat berubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Oleh karena itu masyarakat pesisir perlu di berikan pemberdayaan yang berbasis masyarakat tentunya dengan melihat prinsip-prinsip dan pendekatan pemberdayaan, yang merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakberdayaan yang dialami oleh masyarakat pesisir khususnya para nelayan.

Program-program yang telah dilakukan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat pesisir telah menghasilkan beberapa manfaat dan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, tidak sedikit pula program-program yang tidak berhasil karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan tidak ada keberlanjutan dari masyarakat.

Untuk itu sebagai saran dalam pengembangan dan pemberdayaan nelayan agar berhasil dan tepat guna, adalah bagaimana menjadikan nelayan sebagai subyek dari setiap program pengembangan dan pemberdayaan. Dengan demikian mereka perlu diajak serta keterlibatan untuk merumuskan peran yang dihadapi, serta mencari alternatif-alternatif pemecahannya. Hal ini perlu dilakukan karena merekalah yang lebih tahu dan merasakan peran yang dihadapi dalam usaha meningkatkan taraf kesejahteraan mereka dan keluarganya.

Adapun tugas *stakeholders* lebih fokus dalam membantu mencari berbagai alternatif program pemberdayaan agar pemecahan kemiskinan itu bisa diatasi dengan cara berdiskusi bersama masyarakat pesisir. Masyarakat nelayan harus diberi kesempatan dan kewenangan untuk mandiri dan memutuskannya sendiri terhadap apa yang dikehendakinya tanpa campur tangan pihak luar. Selain itu masyarakat nelayan juga diberi ruang untuk mengembangkan masyarakatnya sendiri secara partisipatif dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rukminto, Isbandi. (2001). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Afrizal, Woyla Saputra Zaini. (2011, Februari 6). Pemberdayaan Nelayan Pancing Tradisional. Diakses dari <https://afrizalwszaini.wordpress.com/2011/02/06/pnpt/>.
- Ambar, Teguh Sulistyani. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ambo, Tuwo. (2011). *Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut - Suatu Pendekatan Ekologi, Sosial-Ekonomi, Kelembagaan, dan Sarana Wilayah*. Surabaya: Brilian Internasional.
- Bangen, D.G. (2001). *Ekosistem dan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serta Pengelolaan Secara Terpadu dan Berkelanjutan* (Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Bogor 29 Oktober – 3 November 2001. Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan IPB).
- Faturochman, et.al. (2007). *Membangun Gerakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.
- Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt, (1993). "Sociology" (edisi ke delapan). Terjemahan Aminuddin Ram dan Tita Sobari). Jakarta: Erlangga.
- Iberahim, (2013). "Upaya Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Pulau Laut Utara". *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, Volume II Edisi 2, Juli-Desember 2013.
- Ife, Jim. (1995). *Community Development: Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice*. Australia: Lobgman Pty Ltd.
- Juliantono, Ferry Joko. (2015). *Dinamika Relasi dan Struktur dalam Reproduksi Kemiskinan Masyarakat Nelayan: Studi atas Masyarakat Nelayan di Desa Teluk, Labuan, Banten*. Diakses dari <https://ekbis.sindonews.com/read/1013402/34/ini--utama-kemiskinan-masyarakat-pesisir>.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (2002). Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu.
- Kusnadi. (2006). *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Lewaherilla, Niki Elistus. (2002). *Pariwisata Bahari; Pemanfaatan Potensi Wilayah Pesisir dan Lautan* (Makalah Falsafah Sains Program Pasca Sarjana Institut

- Pertanian Bogor).
- Masyhuri Imron, (2003). "Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan". *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 5 No. 1 Tahun 2003.
- Mubarak, Zaki. (2010). *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan* (Tesis Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro).
- Mubyarto, et. al. (1984). *Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropology di Dua Desa Pantai*. Jakarta: Rajawali.
- Mujiyadi, Agus B.P, Setyo Sumarno, Muslim Sabarisman. (2007). *Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin (Studi Evaluasi di Delapan Daerah di Indonesia)*. Jakarta: P3KS Press.
- Mujiyadi, Ruaida Murni, Muslim Sabarisman, Nunung Unayah. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kawasan Pantai di Kalimantan Barat*. Jakarta: P3KS Press.
- Nikijuluw Victor P.H. (2001). *Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumber daya Peisisir Secara Terpadu*. Bogor: IPB Bogor.
- Panayatou, T. (1982). *Management Concepts for Small-Scale Fisheries: Economic and Social Aspects*. FAO Fish. Tech. Paper, 228: 53 p.
- Purwanti, Bela Dewi., Wulandari, Kusuma. (2013). *Gaya Hidup Masyarakat Nelayan*, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013, diakses dari <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/>.
- Raharjdo. (1999). *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Republik Indonesia (2011). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang *Penanganan Fakir Miskin*.
- Rizki, Aprilian Wijaya, (2012, Juni 2). Materi kuliah PENELITIAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PESISIR "Sebuah Pengantar Diskusi Persiapan Ekspedisi Zooxanthellae XII Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Tahun 2012" oleh / FDC.XXIII.11 Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP), Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang-KP). Diakses dari https://fdcipb.wordpress.com/2012/06/02/masyarakat_pesisir/.
- Satria, Arif. (2001). *Dinamika Modernisasi Perikanan Formasi Sosial dan Mobilitas Nelayan*. Jakarta: Humaniora Utama Press.
- Satria, Arif, (2002). *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Soekanto, Soerjono. (2006). "Sosiologi Suatu Pengantar". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Cetakan 3). Bandung: Rafika Aditama.
- Surachman. (2015). "Membangun Desa Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Melalui

Pendekatan Dinamika Sistem dan Teori Permainan: Upaya Membangun Indonesia Bagian Timur Sebagai Poros Maritim Dunia". Diakses dari <http://ep.its.ac.id/membangun-desapesisir-dan-pulau-pulau-kecil-melalui-pendekatan-dinamika-sistem-dan-teori-permainan-upaya-membangun-indonesia-bagian-timur-sebagai-poros-maritim-dunia/>.

Tukiran. (2015). *Ketertinggalan dan Kemiskinan di Daerah Pesisir Indonesia*, Diakses dari <http://cpps.ugm.ac.id/ketertinggalan-dan-kemiskinan-di-daerah-pesisir-indonesia>.

Wahyudin Y. (2003). *Sistem Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir*. Disampaikan pada Pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, tanggal 5 Desember 2003, di Kampus Pusat Diklat Kehutanan. see: <http://komitmenku.wordpress.com/2008/06/06/sistem-sosialekonomi-dan-budaya-masyarakat-pesisir/> di unggah tanggal 13 Februari 2017.

Wignyosoebroto, Soetandyo. (2009). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi* (Cet. 2). Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

....., "Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Capai 27,77 Juta", <https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/07/17/090892130/maret-2017-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-capai-27-77-juta>, di unggah 25 Maret 2017.